

Transformasi *E-Government* Menuju *Good Governance* di Pemerintah Kabupaten Sorong

**Yoga Andriyan^{1*}, Adirandi M Rajab², Agfajrina Cindra Pamungkas³, Sofyan
Muhamad¹, Ramles Rahakratat**

Afiliasi Penulis

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pendidikan Muhamamadiyah Sorong, Sorong,
Indonesia

²Program Studi Hukum, Universitas Pendidikan Muhamamadiyah Sorong, Sorong, Indonesia

³Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pendidikan Muhamamadiyah Sorong,
Sorong, Indonesia

*Koresponden Penulis: yogaandriyanmana@gmail.com

Abstrak: Transformasi pemerintahan digital sangat penting dalam lanskap teknologi yang berkembang pesat saat ini. Urgensi transformasi ini berasal dari beberapa faktor penting, termasuk kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan pemberian layanan, penghematan biaya, dan meningkatkan keterlibatan warga. Dengan demikian, pemerintah menyadari pentingnya merangkul transformasi digital untuk melayani warganya dengan lebih baik dan mengatasi tantangan sosial yang kompleks. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini yakni (a) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemerintah Kabupaten Sorong tentang bagaimana menggunakan teknologi dalam pemerintahan, (b) Meningkatkan efisiensi pelayanan publik, (c) Meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi yang mudah diakses, (d) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui platform digital, (e) Meningkatkan kualitas layanan publik, dan (f) Mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia, waktu, dan biaya melalui penerapan sistem e-government yang terintegrasi. Metode dalam pengabdian ini yakni Persiapan, Wawancara, Sosialisasi, Evaluasi, Pelaporan. Teknik pelaksanaan pengabdian ini melalui sosialisasi yakni Ceramah, Diskusi, dan Demonstrasi. Transformasi E-Government mendorong tata kelola yang efektif dan efisien dengan memungkinkan warga untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Platform digital, seperti forum online dan media sosial, memberikan kesempatan bagi warga untuk berbagi pendapat, ide, dan umpan balik mereka dengan pejabat pemerintah. Keterlibatan ini membantu pemerintah untuk lebih memahami kebutuhan dan membuat keputusan berdasarkan informasi. Transformasi E-Government menuju tata kelola pemerintahan yang baik memperkuat demokrasi dengan memberdayakan warga untuk lebih terlibat dan mendapat informasi. Akses ke informasi yang akurat dan peningkatan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan berkontribusi pada sistem demokrasi yang lebih kuat dan akuntabel.

Kata kunci: Transformasi *e-government*, *Government*, *Good Governance*

Abstract: *Digital government transformation is critical in today's rapidly evolving technology landscape. The urgency of this transformation stems from several important factors, including the need to improve efficiency, improve service delivery, save costs, and increase citizen engagement. Thus, the government recognizes the importance of embracing digital transformation to better serve its citizens and address complex social challenges. The objectives of this community service are (a) Increasing the knowledge and skills of the Sorong Regency government on how to use technology in government, (b) Improving the efficiency of public services, (c) Increasing transparency by providing easily accessible information, (d) Increasing public participation in the decision-making process through digital platforms, (e) Improving the quality of public services, and (f) Optimizing the use of human resources, time, and costs through the implementation of an integrated e-government system. The methods in this service are Preparation, Interview, Socialization, Evaluation, and Reporting. The technique for implementing this service is through socialization, namely Lectures, Discussions, and Demonstrations. E-Government transformation promotes effective and efficient governance by allowing citizens to participate in the decision-making process. Digital platforms, such as online forums and social media, provide opportunities for citizens to share their opinions, ideas, and feedback with government officials. This involvement helps the government to better understand needs and make informed decisions. The transformation of E-Government towards good governance strengthens democracy by empowering citizens to be more involved and informed. Access to accurate information and increased participation in decision-making processes contribute to stronger and more accountable democratic systems.*

Keywords: *Transformation of e-government, Government, Good Governance*

© 2024 Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

Received: 13 Mei 2024

Accepted: 21 Juli 2024

Published: 1 Agustus 2024

DOI: 10.61142/samakta.v1i2.127

How to cite: Andriyan, Y., Rajab, A. M., Pamungkas, A. C., Muhamad, S., & Rahakratat, R. (2024). Transformasi E-Government Menuju Good Governance di Pemerintah Kabupaten Sorong. *Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 25–36. <https://doi.org/10.61142/samakta.v1i2.127>.

PENDAHULUAN

Transformasi pemerintahan digital sangat penting dalam lanskap teknologi yang berkembang pesat saat ini. Urgensi transformasi ini berasal dari beberapa faktor penting, termasuk kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan pemberian layanan, penghematan biaya, dan meningkatkan keterlibatan warga. Dengan demikian, pemerintah menyadari pentingnya merangkul transformasi digital untuk melayani warganya dengan lebih baik dan mengatasi tantangan sosial yang kompleks. Kebutuhan manusia untuk mendapatkan informasi dan berbagai layanan elektronik meningkat dengan cepat berkat kemajuan teknologi (M. Munzir *et al.*, 2023). Konsekuensi perubahan tersebut mendorong perlunya perbaikan dalam pengelolaan dan akuntabilitas pelayanan publik (Difinubun *et al.*, 2022). Berdasarkan Undang Undang No. 14/2008 yang memaksa badan publik untuk berbagi informasi publik, dan munculnya banyak website resmi pemerintahan sebagai sarana distribusi informasi dan interaksi (Rinaldi & Yuardani, 2015). Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah menggunakan kemajuan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (Septiani *et al.*, 2022).

Salah satu alasan utama urgensi transformasi *e-government* adalah potensi peningkatan efisiensi dan pemberian layanan secara signifikan. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah dapat merampingkan operasional, mengotomatiskan tugas-tugas rutin, dan memberikan layanan yang lebih cepat dan lebih nyaman kepada warga. Ini tidak hanya meningkatkan pengalaman warga secara keseluruhan tetapi juga memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan fokus pada inisiatif strategis yang mendorong kemajuan masyarakat. Melalui teknologi digital tersedia fitur pengguna sehingga dapat mudah di akses melalui mobile (Purnamasari *et al.*, 2023). E-Government mencakup semua tindakan dalam sektor publik yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan proses pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (Nadila, 2021). *E-government* merupakan upaya pemerintah untuk mendekatkan diri pada masyarakat (Sufianti, 2007). Penyelenggaraan pemerintahan sebagai dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat (Yoga Andriyan, 2021). Maka dari itu perlunya dilakukannya evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintah sebagai suatu tindakan sistematis rasional dalam upaya menilai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan sasaran yang dicapai (Andriyan *et al.*, 2022). Pemerintah mempunyai peran sangat penting dalam pencapaian tujuan negara, khususnya dalam hal pencapaian kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat (Andriyan *et al.*, 2023). Kemudian pemerintah dapat memainkan tiga peran dalam membentuk *good governance*, yaitu membangun transparansi, akuntabilitas publik dan *value for money* (ekonomi, efisiensi dan efektivitas). Penerapan tata kelola yang baik menurut konsep *good governance* mengutamakan prinsip transparansi yang dapat ditafsirkan (Y. Munzir, 2022).

Transformasi digital menawarkan pemerintah kesempatan untuk mencapai penghematan biaya yang substansial dan mengoptimalkan alokasi sumber daya. Melalui penerapan sistem dan proses digital, *overhead* administrasi dapat dikurangi, sehingga penggunaan dana wajib pajak menjadi lebih efisien. Selain itu, inisiatif pemerintah digital dapat memungkinkan manajemen keuangan yang lebih baik, optimalisasi pengadaan, dan tanggung jawab fiskal secara keseluruhan, yang pada akhirnya menguntungkan pemerintah. Ada dua alasan kuat mengapa transformasi digital diperlukan bagi pemerintah, khususnya dalam konteks implementasi *e-government*. Pertama, memastikan pelayanan publik yang lebih baik dan pengawasan administrasi yang lebih baik. Kedua, pembentukan kebijakan

pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi pergeseran global yang disebabkan oleh munculnya Industri 4.0 dan Society 5.0 (Iqbal *et al.*, 2023).

Urgensi transformasi pemerintahan digital semakin digaris bawahi oleh potensi peningkatan keterlibatan dan pemberdayaan warga. Platform dan layanan digital memungkinkan pemerintah untuk berinteraksi dengan warga dengan cara baru, mengumpulkan umpan balik, memberikan informasi, dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Ini tidak hanya menumbuhkan rasa transparansi dan akuntabilitas tetapi juga memberdayakan warga untuk berpartisipasi aktif dalam membentuk kebijakan dan layanan publik. Birokrasi merupakan garda terdepan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun sayangnya birokrasi seringkali dihadapkan pada berbagai problem yang disebut dengan patologi birokrasi sehingga menghambat pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat (Yunas, 2020). E-government memberi orang kesempatan untuk meningkatkan peran mereka sebagai warga negara dengan berpartisipasi dalam pembangunan, mengawasi, dan bekerja sama untuk membuat inovasi bersama yang menghasilkan pemerintahan yang baik untuk kesejahteraan bersama (Suci Pratiwi, 2020). e-Government tidak hanya membuat orang lebih mudah mendapatkan layanan publik tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan efektivitas operasi pemerintah (Nurhakim, 2022).

Era dimana data memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan yang tepat, transformasi pemerintah digital sangat penting untuk memanfaatkan analitik data untuk mendorong perumusan kebijakan dan evaluasi program. Dengan memanfaatkan wawasan data, pemerintah dapat membuat keputusan berbasis bukti yang mengarah pada tata kelola yang lebih efektif, peningkatan layanan publik, dan hasil yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan. *E-government* dapat mengubah seluruh pemerintah menjadi entitas lengkap di mana warga dan bisnis berinteraksi dengan layanan pemerintah tanpa hambatan (Mulyana, 2021).

Ketika pemerintah semakin bergantung pada infrastruktur digital dan sistem berbasis data, keamanan siber menjadi perhatian utama. Urgensi transformasi pemerintah digital ditingkatkan oleh kebutuhan untuk memperkuat langkah-langkah keamanan siber, melindungi informasi sensitif, dan memastikan ketahanan operasi pemerintah yang penting terhadap ancaman dunia maya. Upaya transformasi digital proaktif dapat meningkatkan postur keamanan siber dan mengurangi potensi risiko.

Transformasi pemerintah digital sangat mendesak dalam mengatasi masalah akses inklusif dan pemerataan digital. Dengan memastikan bahwa semua warga memiliki akses ke layanan dan informasi digital, pemerintah dapat menjembatani kesenjangan digital dan mempromosikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Inklusivitas ini sangat penting untuk mendorong kohesi sosial dan memastikan bahwa tidak ada segmen masyarakat yang tertinggal di dunia yang semakin digital. Pelayanan publik yang selama ini dilakukan dengan beinteraksi secara langsung harus dibatasi bahkan harus beralih kepada pelayanan secara online (Dorania Lumbanraja, 2020).

Urgensi transformasi pemerintahan digital tidak dapat dilebih-lebihkan. Dari meningkatkan efisiensi dan pemberian layanan hingga mempromosikan keterlibatan warga, memanfaatkan pengambilan keputusan berbasis data, dan keharusan bagi pemerintah untuk merangkul transformasi digital sudah jelas. Dengan demikian, pemerintah dapat lebih memenuhi kebutuhan warganya yang terus berkembang sambil mendorong kemajuan di berbagai domain. Pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan kemajuan teknologi informasi untuk mengurangi hambatan organisasi birokrasi melalui proses transformasi menuju era e-government (Setiawan *et al.*, 2023).

Berdasarkan paparan Analisa situasi, maka permasalahan yang dihadapi dalam transformasi digital government adalah:

- a. Minimnya pengetahuan konsep e-government.
- b. Minimnya penerapan e-government di Pemerintah Kabupaten Sorong.

Adapun tujuan dalam kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi adopsi dan implementasi teknologi dan proses digital di sektor publik. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi operasi pemerintah, serta meningkatkan pengalaman warga dan bisnis secara keseluruhan berinteraksi dengan pemerintah khususnya di Pemerintah Kampung Jeflio.

Selain itu tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pemerintah Kabupaten Sorong tentang bagaimana menggunakan teknologi dalam pemerintahan;
2. Meningkatkan efisiensi pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengaksesnya;
3. Meningkatkan transparansi dengan menyediakan informasi yang mudah diakses, sehingga mengurangi kemungkinan korupsi dan penyalahgunaan wewenang;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui platform digital, sehingga kebijakan yang dibuat lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui penggunaan teknologi informasi untuk memberikan layanan yang lebih cepat, tepat, dan berkualitas.
6. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia, waktu, dan biaya melalui penerapan sistem e-government yang terintegrasi.

Manfaat yang didapatkan oleh peserta pelatihan yaitu:

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang e-government.
- b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif.

METODE

1. Pemecahan Masalah

Permasalahan yang dihadapi dalam transformasi digital *government* di Pemerintah Kabupaten Sorong khususnya Pemerintah Kampung Jeflio yakni minimnya pengetahuan tentang pengetahuan dan keterampilan tentang *e-government* dan tata kelola pemerintahan yang tidak efisien dan efektif. Kurangnya pemahaman mengenai e-government membuat Pemerintah Kampung Jeflio dalam memberikan pelayanan belum optimal. Sosialisasi transformasi digital government di Pemerintah Kabupaten Sorong bertujuan untuk memfasilitasi adopsi dan implementasi teknologi dan proses digital di sektor publik. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi operasi pemerintah, serta meningkatkan pengalaman warga secara keseluruhan berinteraksi dengan pemerintah khususnya di Pemerintah Kampung Jeflio.

E-government, atau pemerintahan elektronik, mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan kegiatan organisasi sektor publik. Transformasi e-government menuju tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan penanganan berbagai tantangan dan penerapan strategi yang efektif untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga negara dalam proses pemerintahan. Transformasi ini membutuhkan pendekatan komprehensif yang mencakup kemajuan teknologi, reformasi kebijakan, pengembangan kapasitas, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Keberhasilan transformasi e-government menuju tata kelola pemerintahan yang baik menghadapi beberapa tantangan yang perlu ditangani untuk implementasi yang efektif.

Tantangan-tantangan dalam transformasi e-government menuju tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kesenjangan digital mengacu pada kesenjangan antara mereka yang memiliki akses ke TIK dan mereka yang tidak. Menjembatani kesenjangan ini sangat penting untuk memastikan kesempatan yang sama bagi semua warga untuk berpartisipasi dalam inisiatif *e-government*.
2. Karena sistem e-government melibatkan pengumpulan dan penyimpanan data sensitif, ancaman keamanan siber menimbulkan tantangan yang signifikan. Memastikan keamanan dan privasi informasi warga sangat penting untuk membangun kepercayaan dalam layanan *e-government*.
3. Mengembangkan kerangka hukum dan peraturan yang tepat sangat penting untuk mengatur inisiatif *e-government*. Ini termasuk undang-undang perlindungan data, peraturan privasi, dan kebijakan yang terkait dengan transaksi elektronik.
4. Membangun kapasitas pejabat pemerintah dan karyawan untuk secara efektif memanfaatkan TIK sangat penting untuk keberhasilan implementasi inisiatif *e-government*.
5. Mempromosikan keterlibatan dan partisipasi warga dalam proses *e-government* sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Selanjutnya untuk menjawab tantangan dalam pemecahan permasalahan dalam transformasi e-government menuju tata kelola pemerintahan yang baik maka dapat dilakukan beberapa strategi transformasi *e-government*, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur, dimana berinvestasi dalam infrastruktur TIK dan memperluas konektivitas internet ke daerah-daerah yang kurang terlayani dapat membantu menjembatani kesenjangan digital dan memastikan akses yang sama ke layanan *e-government*.
2. Keamanan Siber, dimana dengan menerapkan langkah-langkah keamanan siber yang kuat, seperti protokol enkripsi, mekanisme otentikasi yang aman, dan audit keamanan reguler, dapat membantu melindungi sistem e-government dari ancaman dunia maya.
3. Reformasi Kebijakan, dimana dengan memberlakukan kerangka hukum dan peraturan yang komprehensif yang membahas perlindungan data, hak privasi, transaksi elektronik, dan tanda tangan digital sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inisiatif *e-government*.
4. Program Pengembangan Kapasitas, dimana dengan menyediakan program pelatihan dan lokakarya bagi pejabat pemerintah dan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan TIK mereka dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk memanfaatkan teknologi untuk tata kelola yang efektif.
5. Platform Partisipasi Warga, dimana dengan membangun platform *online* untuk keterlibatan warga, seperti portal e-partisipasi dan mekanisme umpan balik, dapat memfasilitasi keterlibatan warga yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan.

Transformasi *e-government* menuju tata kelola yang baik membutuhkan pendekatan *multi-faceted* yang membahas aspek teknologi, kebijakan, dan sosial. Dengan mengatasi tantangan seperti kesenjangan digital, ancaman keamanan siber, kerangka hukum, pengembangan kapasitas, dan keterlibatan warga, pemerintah dapat menyadari potensi *e-government* dalam mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang inklusif.

2. Khalayak Sasaran Strategis

Pelaksanaan program sosialisasi transformasi digital *government* di Pemerintah Kabupaten Sorong khususnya Pemerintah Kampung Jeflio ini diperuntukan untuk Pemerintah Kampung Jeflio dan Masyarakat Kampung Jeflio.

3. Metode Kegiatan

Adanya kegiatan pengabdian yang dilaksanakan bertujuan untuk memfasilitasi adopsi dan implementasi teknologi dan proses digital di sektor publik. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi operasi pemerintah, serta meningkatkan pengalaman warga dan bisnis secara keseluruhan berinteraksi dengan pemerintah khususnya di Pemerintah Kampung Jeflio.

Strategi pelaksanaan dalam pengabdian ini yakni pertama, program ini dilaksanakan dengan sosialisasi terkait Transformasi *E-Government Menuju Good Governance* di Pemerintah Kabupaten Sorong dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif di Pemerintah Kampung Jeflio. Secara umum kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi (Hidayat *et al.*, 2020, 2022; Hidayat & Fathurrahman, 2018; Sirojuddin *et al.*, 2022; Supriyadi & Reski, 2020, 2024).

Adapun tahapan pelaksanaan pengabdian ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. Persiapan

Dalam tahap ini, tim pengusul melakukan peninjauan lokasi dengan melakukan komunikasi awal dengan Pemerintah Kampung Jeflio. Dari hasil wawancara tim pengabdian didapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan umum yang dihadapi oleh Pemerintah Kampung Jeflio.

2. Pelaksanaan

Dalam tahapan ini tim pengabdian memberikan pengenalan terkait Transformasi *E-Government Menuju Good Governance* di Pemerintah Kabupaten Sorong khususnya di Pemerintah Kampung Jeflio untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif di Pemerintah Kampung Jeflio. Kegiatan ini dilakukan melalui beberapa metode yaitu penyampaian langsung (ceramah) dan demonstrasi.

3. Evaluasi

Evaluasi pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tim pengabdian setelah melaksanakan kegiatan pengabdian.

4. Pelaporan

Dalam tahapan ini tim pengabdian membuat laporan pengabdian dari kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berjudul transformasi digital *government* di Pemerintah Kabupaten Sorong untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi operasi pemerintah, serta meningkatkan pengalaman warga secara keseluruhan berinteraksi dengan pemerintah khususnya di Pemerintah Kampung Jeflio dan masyarakat Kampung Jeflio. Selain itu dalam kegiatan sosialisasi Transformasi *e-government* menuju tata kelola yang baik membutuhkan pendekatan *multi-faceted* yang membahas aspek teknologi, kebijakan, dan sosial. Dengan mengatasi tantangan seperti kesenjangan digital, ancaman keamanan siber, kerangka hukum, pengembangan kapasitas, dan keterlibatan warga, pemerintah Kampung Jeflio dapat menyadari potensi *e-government* dalam mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang inklusif. Pengabdian ini diikuti oleh 70 orang yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Kampung Jeflio dan masyarakat Kampung Jeflio.

Pelaksanaan pengabdian Transformasi *E-Government Menuju Good Governance* di Pemerintah Kabupaten Sorong selain pemberian materi, terdapat sesi diskusi dimana Pemerintah Kabupaten Jeflio dan masyarakat Kampung Jeflio diberi waktu untuk tanya jawab terhadap permasalahan yang dihadapi di Pemerintah Kampung Jeflio dan pelayanan

yang diberikan kepada masyarakat Kampung Jeflio. Dari diskusi tersebut diketahui bahwa peserta sosialisasi masih banyak yang belum paham terkait Transformasi *E-Government* Menuju *Good Governance*. Dengan sosialisasi ini maka akan meningkatkan pemahaman terkait Transformasi *E-Government* Menuju *Good Governance* di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Sorong.

Transformasi *E-Government* merupakan proses krusial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan efisiensi tata kelola. Transformasi ini melibatkan adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan, melibatkan warga, dan merampingkan operasi pemerintah. Hasil transformasi *E-Government* menuju tata kelola pemerintahan yang baik beragam dan dapat dianalisis dalam beberapa aspek utama.

Salah satu tujuan utama transformasi *E-Government* adalah membuat layanan publik lebih mudah diakses oleh warga negara. Dengan memanfaatkan platform digital, warga dapat mengakses berbagai layanan, seperti mengajukan izin, membayar pajak, dan mengakses informasi pemerintah, dari kenyamanan rumah mereka. Ini tidak hanya menghemat waktu tetapi juga mengurangi kebutuhan untuk mengunjungi kantor-kantor pemerintah, yang dapat menjadi tantangan bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil.

Transformasi *E-Government* mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dengan membuat operasi pemerintah lebih transparan. Dengan mendigitalkan catatan dan membuatnya tersedia secara online, warga negara dapat mengakses informasi tentang pengeluaran pemerintah, kontrak, dan kebijakan. Peningkatan transparansi ini membantu mengurangi korupsi dan mendorong warga untuk meminta pertanggungjawaban pejabat pemerintah. Adopsi TIK dalam transformasi *E-Government* merampingkan operasi pemerintah dan meningkatkan pemberian layanan. Otomatisasi proses, seperti pengumpulan pajak dan pencairan manfaat, mengurangi kesalahan manusia dan mempercepat pemberian layanan. Selain itu, platform digital memungkinkan pemerintah untuk memantau kinerja layanan dan melakukan perbaikan yang diperlukan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas.

Transformasi *E-Government* mendorong tata kelola yang efektif dan efisien dengan memungkinkan warga untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Platform digital, seperti forum *online* dan media sosial, memberikan kesempatan bagi warga untuk berbagi pendapat, ide, dan umpan balik mereka dengan pejabat pemerintah. Keterlibatan ini membantu pemerintah untuk lebih memahami kebutuhan dan membuat keputusan berdasarkan informasi. Transformasi *E-Government* menuju tata kelola pemerintahan yang baik memperkuat demokrasi dengan memberdayakan warga untuk lebih terlibat dan mendapat informasi. Akses ke informasi yang akurat dan peningkatan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan berkontribusi pada sistem demokrasi yang lebih kuat dan akuntabel.

Setelah dilakukan pengabdian maka beberapa capaian yang dihasilkan antara lain:

1. Meningkatkan pengetahuan terkait pentingnya penerapan teknologi dalam sektor pemerintahan.
2. Kesadaran masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.
3. Peningkatan kesadaran masyarakat pentingnya pengelolaan sumber daya manusia yang optimal.
4. Peningkatan kesadaran pemerintah terhadap kapasitas sumber daya manusia pemerintah.
5. Peningkatan efisiensi terkait layanan pemerintah terhadap masyarakat.

Transformasi *E-Government* menuju tata kelola pemerintahan yang baik memiliki

banyak hasil, termasuk peningkatan akses ke layanan publik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pemberian layanan yang efisien, tata kelola yang inklusif dan responsif, dan penguatan demokrasi. Dengan memanfaatkan kekuatan TIK, pemerintah dapat secara efektif memberikan layanan, melibatkan warga, dan meningkatkan tata kelola secara keseluruhan.

Keberhasilan kegiatan pengabdian ini menguatkan hasil-hasil pengabdian sebelumnya, dimana kegiatan pengabdian masyarakat menjadi hal yang sangat diperlukan sebagai bentuk hilirisasi produk ilmiah dari akademisi di lingkungan kampus kepada masyarakat. Beberapa kegiatan pengabdian dengan hasil secara umum mendukung kegiatan pengabdian ini diantaranya dilakukan oleh (Aulia *et al.*, 2024; Fajrin *et al.*, 2024; Hidayat & Fathurrahman, 2018; Jumiarni & Ekaputri, 2024; M. Munzir *et al.*, 2023; Raharja *et al.*, 2021; Sirojuddin *et al.*, 2022; Supriyadi & Reski, 2024; Widarti *et al.*, 2024).

KESIMPULAN

Kegiatan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Transformasi *E-Government* Menuju *Good Governance* di Pemerintah Kabupaten Sorong terhadap Pemerintah Kampung Jeflio dan masyarakat Kampung Jeflio yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong berupa sosialisasi Transformasi *E-Government* Menuju *Good Governance* untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang e-government dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif. Maka dapat diambil kesimpulan adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Transformasi *E-Government* Menuju *Good Governance* di Pemerintah Kabupaten Sorong terhadap Pemerintah Kampung Jeflio dan masyarakat Kampung Jeflio memberikan kesempatan bagi Pemerintah Kampung Jeflio dan masyarakat Kampung Jeflio untuk meningkatkan pengetahuan terkait konsep e-government.
- b. Kegiatan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Transformasi *E-Government* Menuju *Good Governance* di Pemerintah Kabupaten Sorong terhadap Pemerintah Kampung Jeflio dan masyarakat Kampung Jeflio mendapatkan respon yang positif dimana Pemerintah Kampung Jeflio dan masyarakat sangat antusias terhadap materi sosialisasi Transformasi *E-Government* Menuju *Good Governance* yang diberikan mengingat minimnya pengetahuan konsep e-government dan penerapan *e-goverment* di Pemerintah Kabupaten Sorong.

Adapun saran untuk kegiatan pengabdian selanjutnya dan sebagai upaya rencana tindak lanjut dari kegiatan ini maka sangat diperlukan kegiatan sejenis dengan melakukan pelatihan teknis terkait *e-government* untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

UCAPAN TERIMAKASIH

Sebuah kehormatan bagi kami untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah terlibat dalam suksesnya kegiatan pengabdian ini, yang bertujuan untuk mengarahkan pemerintahan kami menuju transformasi *E-Government* yang berkesinambungan dan *Good Governance* yang kokoh.

Terima kasih kepada seluruh tim yang telah berjuang keras dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan ini. Dedikasi dan kerja keras kalian telah memastikan bahwa langkah-langkah yang kami ambil menuju efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan telah diperkuat.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemangku kepentingan, masyarakat, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerjasama selama pelaksanaan kegiatan ini. Partisipasi aktif kalian telah menjadi pendorong utama keberhasilan upaya-upaya kami dalam meningkatkan pelayanan publik.

Semoga hasil-hasil yang telah kami capai dalam kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Sorong. Kami yakin bahwa dengan terus berkolaborasi dan berinovasi, kami akan mampu mewujudkan visi kami untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan rakyat.

Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama dan dukungan semua pihak. Mari kita terus bersatu dan bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita bersama demi kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Sorong.

REFERENSI

- Andriyan, Y., Muhamad, S., Difinubun, Y., & Hidayat, H. (2022). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Di Kota Tual). *JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 17–24.
- Andriyan, Y., Rajab, A. M., Hidayat, R., Muhamad, S., & Munzir, M. (2023). Eksistensi Naskah Akademik dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. *Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adiminstrasi Publik*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.36232/jppadap.v3i1.4596>
- Aulia, D., Wahyuni, N., & Assahra, D. (2024). Pembelajaran tentang Thaharah , Mandi Wajib dan Sholat. *Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–7.
- Difinubun, Y., Asriani, D., & Yanti, I. B. (2022). Pengaruh Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Dengan Pengawasan Fungsional Sebagai Variabel Moderating. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 2(1), 34–45. <https://doi.org/10.36232/jurnalfairakuntansiunimuda.v2i1.2884>
- Doramia Lumbanraja, A. (2020). Urgensi Transformasi Pelayanan Publik melalui E-Government Pada New Normal dan Reformasi Regulasi Birokrasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 220–231. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.220-231>
- Fajrin, M., Wahyuni, N., Miranti, M., Aulia, M., & Marwa, M. (2024). Meningkatkan Pemahaman Siswa-Siswi Tentang Shalat dan. *Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 16–20. <https://ejournal.edukhatulistiwa.com/index.php/samakta>
- Hidayat, F. A., Difinubun, M. I., Sutomo, E., Efendi, F., Anjarwati, A., Ma'arif, S., & Rumbewas, M. (2022). Introduksi Teknik Aklesa (Akuaponik Lele dan Sayuran) di Kampung Warmon Kokoda Kabupaten Sorong. *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 118–124. <https://unimuda.ejournal.id/jurnalabdimasa/article/download/2259/951>
- Hidayat, F. A., & Fathurrahman, F. (2018). Pendampingan Pemanfaatan Laboratorium Virtual dalam Pembelajaran IPA. *Abdimasa*, 1(1), 6–14. <https://doi.org/10.29333/aje.2019.423a>
- Hidayat, F. A., Ramadhani, I. A., & Ihsan, I. (2020). Pendampingan Program Hydroponic Garden Sebagai Solusi Pemenuhan Kebutuhan Sayuran Bagi Masyarakat Pesisir Pantai Kampung Fafanlap Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat. *Jurnal ABDIMASA*

Pengabdian Masyarakat, 3(1), 27–34.

- Iqbal, M., Putra, J., Hasibuan, J., & Huda, D. N. (2023). Transformasi Digital Pemerintah (Studi Kasus: Implementasi e-Government dan Hambatannya). *Journal Social Society*, 3(2), 80–94.
- Jumiarni, D., & Ekaputri, R. Z. (2024). Penerapan Teknologi Pengolahan Limbah Cair Tahu Untuk Pembuatan Nata De Soya Bagi Masyarakat Desa Tanjung Terdana Kecamatan Pondok Kubang Bengkulu Tengah. *Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 21–27.
- Mulyana, G. (2021). *Artikel Model Kepemimpinan Untuk Transformasi E- Government Di Indonesia*. 3(1), 50–59.
- Munzir, M., Danuwijaya, T., Tunang, A., Dinar, L., & Kassa, P. (2023). Edukasi Financial Technology (FINTECH) pada Pelajar di Kota Sorong. *Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 28–35. <https://doi.org/10.61142/samakta.v1i1.59>
- Munzir, Y. (2022). Analisis Indeks Pembangunan Manusia dan Leverage pada Ketersediaan dan Keteraksesan Informasi Keuangan Daerah. *Accounting Indonesian Research*, 2(2), 18–32.
- Nadila, S. (2021). Implementasi Electronic Government Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Smart City. *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 3(3), 72–83.
- Nurhakim, M. R. S. (2022). Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 46(2), 112–128.
- Purnamasari, I., Sari, Z. N., Prasetyo, A. R., Marcelliantika, A., Aruna, A., & Surya, E. P. (2023). Rancang Desain Sistem Informasi Produk Unggulan Desa Pakisjajar, Kabupaten Malang, Jawa Timur Berbasis Progressive Web-App. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat*, 1. <https://doi.org/10.61142/psnpm.v1.93>
- Raharja, E. P., Latifah, L., Amanah, M., Wijayanto, Y. I., Riskawati, R., & Pransiska, L. (2021). Community empowerment through the activation of early childhood education in Harapan Jaya Village, South Misool, Raja Ampat. *Journal of Community Service and Empowerment*, 3(2), 88–93. <https://doi.org/10.22219/jcse.v3i2.16524>
- Rinaldi, H., & Yuardani, A. M. (2015). Analisis Peluang Transformasi “E-Government” menjadi “E-Democracy” melalui Website Resmi Pemerintah Daerah. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31(1), 103. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i1.1201>
- Septiani, A., Syamsir, S., Aulia, A. R., Resti, A., Fazira, V., Sukma Wijaya, D. A., & Aldeo, Z. (2022). Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3(5), 302. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i5.183>
- Setiawan, A., Halimah, M., & Faidah, R. N. (2023). Implementasi E-Government Berbasis Situs Web. *Indonesian Journal of Education and Social Sciences*, 2(1), 7–12. <https://doi.org/10.56916/ijess.v2i1.353>
- Sirojuddin, Rustamadji, Hidayat, F. A., Wahyuni, N. S., Rifa’1, M., Andhini, D. S., Musa, L., & Mambrasar, R. (2022). Peningkatan skala usaha mandiri melalui peternakan lele di Kelurahan Malasom sebagai bentuk implementasi MBKM. *Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 105–110.

- Suci Pratiwi, C. (2020). Implementasi E-Government Pada Situs Web Pemerintah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Open Government Di Provinsi Jambi. *Jurnal Khazanah Intelektual*, 2(1), 109–126. <https://doi.org/10.37250/newkiki.v2i1.18>
- Sufianti, E. (2007). Aplikasi e-Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Beberapa Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 4(4), 3.
- Supriyadi, S., & Reski, A. (2020). Pendidikan dan Pelatihan Mitigasi Bencana Berbasis Sains Asli pada Siswa MI Al-Ma'arif Merauke. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 8(1), 86–91.
- Supriyadi, S., & Reski, A. (2024). Pendidikan dan pelatihan mitigasi bencana berbasis sains asli pada siswa mi al-ma'arif merauke. *Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 1–7.
- Widarti, H. R., Munzil, Rahayu, S., Setiawan, N. C. E., Rokhim, D. A., Pratiwi, J. K., Peni, R., & Wahyudi, A. (2024). Analisis Konten dan Materi Kegiatan Pengabdian Pendampingan Peningkatan Kompetensi Pendidik Kelompok MGMP Kimia Sidoarjo: Studi Pendahuluan. *Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 8–15.
- Yoga Andriyan. (2021). Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 3(1), 47–54.
- Yunas, N. S. (2020). Implementasi e-Government dalam Meminimalisasi Praktik Rent Seeking Behaviour pada Birokrasi Pemerintah Kota Surabaya. *Matra Pembaruan*, 4(1), 13–23. <https://doi.org/10.21787/mp.4.1.2020.13-23>